

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Penyerapan Anggaran DKI Tak Maksimal

**JAKARTA** – Penyerapan anggaran DKI Jakarta 2018 tidak maksimal. Saat ini baru terserap Rp41 triliun atau 54,83% dari total Rp75 triliun. Penyebab rendahnya penyerapan anggaran salah satunya akibat gagal lelang.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, banyak kegiatan gagal lelang disebabkan belum tersedianya barang yang dibutuhkan, tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan, dan gagal kontrak.

Misalnya pengadaan mobil pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran DKI di mana ada satu mobil khusus yang terdiri atas dua tangki sekaligus, tangki air dan tangki memadamkan api seperti spons atau busa. Spesifikasi tersebut tidak bisa dipenuhi dan berujung gagal lelang.

"Ada juga alasan ada pihak ketiga. Mungkin dia modalnya kuat, termin pertama dia tidak tagih, termin kedua tidak, ketiga tidak. Mungkin dia nagihnya langsung di termin keempat, di Desember sekaligus. Ada yang modelnya begitu. Macam-macam lah," ujar Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta kemarin.

Akibat penyerapan rendah pada tahun ini, diprediksi serapan anggaran di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berakhir sama seperti tahun lalu. Rata-rata serapan anggaran di SKPD berkisar di bawah 80%. "Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Pendidikan menjadi SKPD penyerapan terendah. Semua dipacu terus," kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu.

**Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur Anies yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran.**

DITE ABIMANYU  
Anggota DPRD DKI Jakarta

Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah DKI Jakarta Blessmiyanda menuturkan, dari nilai yang ditender di instansinya sebesar Rp34 triliun, belanja langsung APBD 2018 hanya sekitar 3% atau Rp8,5 triliun yang gagal. "Antara lain instalasi pengolahan air limbah (Ipal) komunal, truk tangki BBM pemadam kebakaran," ucapnya.

Terkait evaluasi ke depan supaya tidak gagal lelang, perencanaan pengadaan oleh SKPD harus dilakukan cermat dan lebih dini. "Akan diusulkan semacam instruksi gubernur untuk percepatan rencana pengadaan barang dan jasa pada 2019," katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dite Abi-

manyu menilai beberapa kegiatan pembangunan Pemprov DKI pada tahun anggaran 2018 berjalan sangat lambat seperti pembangunan hunian DP Nol Rupiah dan rehabilitasi gedung sekolah.

Hingga pertengahan tahun anggaran pada Juni 2018, angka penyerapan anggaran baru sekitar 28,5%. Kemudian data akhir September lalu angkanya telah beranjak menjadi 47,6%. "Kondisi ini tentu kurang sejalan dengan semangat pemerintahan Gubernur Anies yang berjanji meningkatkan penyerapan anggaran. Di sisi lain, banyak kegiatan pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan rumah DP Nol Rupiah, rehabilitasi gedung sekolah, dan kegiatan-kegiatan lain," ungkap Dite.

Sementara itu Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, segala perencanaan anggaran yang dilakukan TAPD harus memberikan pemahaman secara komprehensif sebelum dibawa lebih lanjut dalam rapat lintas komisi DPRD.

Dia berharap aspek peren-

canaan dapat dilakukan secara akurat dan tahap pelaksanaan lelang sebisa mungkin di awal tahun. "Kalau perlu untuk proyek-proyek besar bisa dilakukan skema tahun jamak atau lelang dini sehingga rendahnya penyerapan anggaran teratasi," ujar Sani— panggilan akrab Triwisaksana—beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, anggaran paling lambat disahkan 30 November 2018. Dia menilai waktu pembahasan APBD kali ini sangat ketat mengingat banyak kegiatan di DPRD yang dilakukan secara bersamaan seperti reses, kunjungan kerja, serta bimbingan teknis. Meski demikian dia memastikan pembahasan anggaran tetap harus diprioritaskan.

■ bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	8
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Penyerapan Anggaran DKI Tak Maksimal

### MASIH DI BAWAH 80%

Penyerapan anggaran tahun ini diperkirakan berakhir sama seperti tahun lalu. Rata-rata satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyerap anggaran di bawah 80%.

### INSTANSI DENGAN SERAPAN ANGGARAN RENDAH



**Penyerapan belanja daerah: Rp41 triliun atau 54,83% dari total Rp75 triliun**

#### APBD 2018

**Belanja Daerah: Rp71,16 triliun**

- Belanja Tidak Langsung Rp30,65 triliun meliputi Belanja Pegawai Rp20,12 triliun, Belanja Bunga Rp50,52 miliar, Belanja Subsidi Rp4,21 triliun, Belanja Hibah Rp1,75 triliun, Belanja Bantuan Sosial Rp4,07 triliun, Belanja Bantuan Keuangan Rp271,78 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp153,02 miliar.

- Belanja Langsung sebesar Rp40,51 triliun

**Pengeluaran Pembiayaan: Rp5,94 triliun**

- Penyediaan transportasi massal dalam rangka penanggulangan kemacetan
- Penugasan beberapa proyek infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana Asian Games 2018
- Pembayaran utang pokok



Ada juga alasan pihak ketiga. Mungkin dia modalnya kuat, termin pertama dia tidak tagih, termin kedua tidak, ketiga tidak. Mungkin dia nagihnya langsung di termin keempat, di Desember sekaligus. Ada yang modelnya begitu.

**Saefullah**

Sekretaris Daerah DKI Jakarta

Sumber: diolah dari berbagai sumber

### GAGAL LELANG DISEBABKAN

- Belum tersedianya barang dibutuhkan
- Tidak sesuai spesifikasi dibutuhkan
- Gagal kontrak



**ANGGARAN DKI JAKARTA**

APBD 2017  
**Rp70,1 triliun**

APBD 2018  
**Rp77,1 triliun**

APBD Perubahan 2018  
**Rp83,2 triliun**

RAPBD 2019  
**Rp87,3 triliun**